



Hindarkan UMKM dari Rentenir

Kukuhkan Delapan TPAKD di Kalbar

PONTIANAK - Delapan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kabupaten/kota di Kalimantan Barat dikukuhkan secara serentak di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Senin (14/11).

Delapan TPAKD itu antara lain Mempawah, Singkawang, Ketapang Sintang, Melawi, Sambas, Landak dan Kayong Utara. Pengukuhan ini merupakan puncak dari realisasi pembentukan TPAKD di Kalimantan Barat.

Sebelumnya, telah terbentuk dan dikukuhkan enam TPAKD kabupaten/kota lainnya hingga tahun 2021. Pengukuhan ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai provinsi ke-17 yang telah membentuk TPAKD di seluruh kabupaten dan kota. Wakil Ketua 1 Komite IV DPD RI Sukiryanto, mengapresiasi terbentuk dan dikukuhkannya seluruh TPAKD se-Kalimantan Barat. Selanjutnya diharapkan dapat berperan aktif meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kalimantan Barat.

"Sehingga semakin banyak masyarakat dan pelaku UMKM yang lebih cakap dalam memi-



Sukiryanto
Wakil Ketua 1
Komite IV DPD RI



Semakin banyak masyarakat dan pelaku UMKM yang lebih cakap dalam memilih produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta dapat terhindar dari praktik investasi dan pinjaman online ilegal yang kini kian meresahkan

lih produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta dapat terhindar dari praktik investasi dan pinjaman online ilegal yang kini kian meresahkan," kata Sukiryanto disela-sela acara pengukuhan.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji juga mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota yang telah memenuhi amanat pembentukan TPAKD. Menurut Sutarmidji, pentingnya pembentukan TPAKD guna terciptanya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat ke sektor jasa keuangan formal sehingga akan memajukan upaya pemulihan dan pembangunan perekonomian di daerah. Ia mengatakan bah-

wa hampir seluruh aktivitas masyarakat khususnya pelaku usaha yang membutuhkan beragam layanan jasa keuangan untuk kebutuhan dan operasional usaha. Melalui TPAKD, diharapkan akses permodalan oleh UMKM ke lembaga keuangan formal semakin mudah untuk diakses.

"Sehingga menghindarkan pelaku UMKM dari ketergantungan meminjam dari rentenir dengan bunga pinjaman yang besar," ujar Sutarmidji.

Ia juga meminta agar lembaga jasa keuangan berperan aktif dalam TPAKD. Lembaga tersebut tidak hanya mendorong penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, namun juga memberikan pembinaan

Delapan TPAKD yang Dikukuhkan

- Mempawah
- Singkawang
- Ketapang
- Sintang
- Melawi
- Sambas
- Landak
- Kayong Utara

dan pemberdayaan serta bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Seluruh pengurus dan anggota TPAKD di Kalimantan Barat juga diharapkan dapat berperan aktif guna memastikan TPAKD yang telah dibentuk, membawa kontribusi yang nyata untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Lanjut Sutarmidji, melihat begitu besarnya potensi mineral, pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Barat, diharapkan TPAKD dapat mengambil bagian dalam upaya mendorong hilirisasi industri untuk produksi komoditi mineral dan perkebunan di Kalimantan Barat.

"Sehingga produk yang dihasilkan berupa barang setengah jadi dan jadi, yang mempunyai nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi," pungkas Sutarmidji. (ms)